

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah

Eksplorasi dan eksploitasi Migas telah dimulai di Bojonegoro sejak tahun 1893 oleh Adrian Stoop pria berkebangsaan Belanda, tepatnya di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Pada tahun 2000 Eksplorasi dan Eksploitasi migas di Bojonegoro mulai serius ditindaklanjuti. Berbagai penelitian serta perundingan alot kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah mulai dilakukan. Eksplorasi terus dilakukan sehingga menemukan titik-titik baru daerah yang mengandung migas, diantaranya Lapangan Sukowati yang dieksploitasi pada tahun 2008, Blok Cepu pada tahun 2010, serta Blok Tuban, Blok Nona, dan Blok Blora masih dalam tahap eksplorasi. Tidak ketinggalan pula daerah yang mengandung gas bumi juga ditemukan yaitu ladang minyak Jambaran di kecamatan Purwosari.

Pertambangan merupakan bidang usaha padat modal yang memerlukan lahan cukup luas, serta tenaga ahli dalam pengoperasiannya. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.” Kegiatan eksploitasi migas tersebut telah melibatkan berbagai pihak. Dengan prosedur yang rumit serta sarat akan kepentingan politik, korporasi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 17 Agustus 2015 telah disetujui rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) Lapangan Jambaran oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Pada tahap awal pengerjaannya memerlukan 300 pekerja. Mega proyek yang diproyeksi membutuhkan investasi sebesar Rp 28 Triliun ini dalam proses awal eksploitasi migasnya melibatkan pemerintah untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan meliputi 26 Hektare lahan masyarakat dan 144 hektare lahan Perhutani. Eksploitasi gas ditargetkan mulai produksi sebesar 227 juta kaki kubik (Million Standart Cubic Feed per Day/MMSCFD) gas bumi per hari pada kuartal pertama 2019, serta mencapai puncak produksi sebesar 315 juta kaki kubik pada 2020.

Menilik kepada fenomena eksploitasi migas yang telah dilakukan di Bojonegoro. Seperti Blok Cepu dengan Exxon Mobile sebagai operator, blok Sukowati dioperasikan oleh Petro China dan blok-blok yang lain. Kegiatan eksploitasi migas memiliki dampak sosial yang cukup besar.

Dalam penelitiannya tahun 1995, Jeffrey Sachs mengidentifikasi Negara dengan sumber daya yang kaya tumbuh lebih lambat dibandingkan negara-negara miskin lainnya dengan memperhitungkan variabel seperti pendapatan per kapita awal dan kebijakan perdagangan. Hal tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam konsep Paradox of Plenty. Paradox of Plenty adalah sebuah realitas berlawanan dari keberlimpahan sumber daya alam. Dalam buku *Escaping The Resource Curse*, Michael D. Ross, ahli dari Universitas California, menyatakan bahwa keberlimpahan minyak akan menjadi “kutukan” sumber daya alam jika tidak dikelola secara baik (Ross dalam Humphreys et.al 2007). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memerlukan kewaspadaan yang sangat tinggi baik dampak sosial, dampak alam yang berpotensi akan timbul, maupun kecelakaan kerja.

Fenomena tersebut telah dialami oleh kabupaten Bekasi. Daerah Bekasi merupakan penghasil migas yang memasok 56% suplai energi di Jabodetabek. Namun, potret kemiskinan pun masih tersebar. Setidaknya, ada 4 kecamatan yang masih banyak ditemui keluarga miskin, seperti Kecamatan Babelan terdapat 16.000 keluarga,

Tarumajaya 10.000, Muara Gembong 6.000, dan Cabungin 8.000 Keluarga. Padahal setiap tahun Kabupaten Bekasi menyeteror uang senilai Rp 38 triliun rupiah untuk pajak dari sekitar 3000 perusahaan kepada pemerintah pusat (FKDPM, 2011) Forum Komunikasi Derah Penghasil Migas.

Eksplorasi migas juga menyimpan ancaman kecelakaan kerja baik karena *human error* maupun faktor alam. Menurut Muhammad (2000) dampak kegiatan pertambangan dapat bersifat positif maupun negatif terhadap ekosistem daerah setempat. Munculnya dampak positif maupun negatif dari pertambangan terjadi pada tahap eksplorasi dan eksploitasi termasuk pemrosesan serta pasca tambang. Beberapa kecelakaan di area pengeboran pun telah terjadi, seperti kebocoran gas H₂S (Hidrogen Sulfida) di Blok Sukowati yang meracuni 25 warga setempat pada Februari 2016. Kebocoran juga terjadi di Blok Cepu yang mengakibatkan 2 warga keracunan. Dari segi dampak alam, akibat dari maraknya pengeboran migas juga mempengaruhi cuaca di Bojonegoro, tercatat pada Oktober 2011 suhu di Bojonegoro hingga mencapai 43,8°C lebih panas dibanding kota Mekah yang saat itu hanya 40°C. Tingginya suhu udara tersebut diduga bukan hanya karena gundulnya hutan, tetapi juga merupakan efek negatif yang ditimbulkan dari eksplorasi migas Blok Cepu. Keluhan atas polusi udara yang disebabkan kendaraan berat serta polusi suara dari mesin produksi pun sering kali terdengar dari warga sekitar pertambangan.

Bukan hanya itu, menilik dari tindakan eksplorasi dan eksploitasi migas yang telah dilakukan, sering kali rakyat sekitar menjadi korban atas dilaksanakannya megaproyek tersebut. “Pengambilalihan lahan atau yang sering disebut dengan pembebasan lahan adalah ciri kapitalisme. Keuntungan kapital diperoleh melalui pengambilalihan kepemilikan pihak ketiga baik kelompok masyarakat maupun kelas sosial lain. Praktek pengambilalihan lahan ini diperlukan untuk menegaskan kepemilikan pribadi atas kepemilikan bersama atas sumberdaya alam, kebudayaan dan barang-barang publik lainnya”. (Harvey, 2003)

Dalam upaya pembebasan lahan di area pengeboran migas Blok Cepu, bermunculan banyak makelar ataupun spekulan tanah. Sering kali terjadi rantai makelar tanah. Makelar-makelar tanah tersebut menjual tanahnya ke makelar yang lain dan begitu seterusnya hingga makelar ke tiga. Hampir 50% kepemilikan tanah yang masuk area pembebasan sudah berpindah kepemilikan ke spekulan bermodal besar dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Jombang dan lainnya. Sedangkan warga pemilik tanah hanya mendapatkan harga yang kecil dalam pembelian tanahnya.

Beberapa kasus yang telah terjadi adalah pembebasan lahan di desa Gayam dan Desa Mojodelik ladang minyak Banyu Urip blok Cepu. Maraknya makelar tanah yang datang menimbulkan persaingan yang sengit. Makelar tersebut menghalalkan beragam cara untuk mendapatkan tanah warga, baik dengan membujuk dengan harga yang tinggi, menggunakan perantara perangkat desa, hingga menakut-nakuti pemilik tanah maupun dengan cara supranatural. Sering kali makelar-makelar tersebut menakut-nakuti pemilik tanah yang tidak bersertifikat dan lantas membeli dengan harga yang rendah.

Meski kenyataannya dengan harga yang rendah pun pemilik tanah tetap mendapat uang yang melimpah karena luasnya tanah yang dibeli. Rendahnya pendidikan memperumit kondisi ekonomi mereka, pasalnya uang hasil pembebasan lahan seringkali digunakan untuk hal-hal konsumtif yang sekedar mementingkan gengsi atau *lifestyle*. Anak-anak muda berlomba-lomba membeli motor, handphone, mobil dan membangun rumah sebaik-baiknya. Mereka juga mulai mengenal hiburan diskotik dan hiburan dewasa di Surabaya. Sehingga untuk cadangan uang atau penghasilan pun mengalami penurunan yang signifikan. Mereka benar-benar menikmati kekayaan hasil jual beli tanah. Namun, setelah itu mereka mendapati dirinya sangat miskin (*underclass*), mengalami ketidakpastian hidup, kecemasan dan rasa linglung akibat pelemahan ekonomi.

Penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup (Etzion, 1967 dalam Kartono, 2003) Banyak terdapat orang-orang asing yang datang ke desa untuk menjadi makelar tanah, pebisnis kontraktor maupun menjadi karyawan perusahaan. “Marginalitas selalu merupakan sesuatu keterhubungan dengan kekuasaan yang berlangsung secara terus-menerus”. (Tania, 1999) Dari kondisi tersebut, warga pribumi termarginalkan oleh orang-orang asing yang datang. “Mereka yang tidak punya skill, tak berpendidikan dan tak bersertifikat dipastikan tereksklusi dari pekerjaan”. (Sennet, 2016) Kembali pada rendahnya pendidikan pemuda desa sekitar pertambangan, harapan untuk ikut serta dalam megaproyek eksploitasi migas seringkali pupus. Anggapan pendidikan formal tidak terlalu penting di kalangan masyarakat pedesaan pun menjadi bumerang mengingat rata-rata pemuda desa sekitar hanya sekolah hingga bangku SD-SMP. Standart pendidikan dari perusahaan yang menetapkan minimal pendidikan akhir adalah SMA/SMK sederajat untuk posisi satpam, *cleaning service*, hingga sekedar pengatur lalu lintas belum dapat dicapai oleh pemuda sekitar.

Leonard W Doob memberikan pendapat opini publik itu sifatnya akan tetap laten (terpendam) dan baru memperlihatkan sifat yang aktif apabila sesuatu isu itu timbul dalam suatu kelompok atau lingkungan. Sesuatu itu timbul apabila terdapat konflik, kegelisahan, dan frustasi (Sarjono, 1997;28)

Menurut Adinegoro opini publik sebagai ratu dunia, opini publik mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa yang mampu menembus hal-hal diluar dugaan (Sarjono, 1997;27)

Jika menelaah pendapat dari Leonard W Doob dan Adinegoro opini publik terbentuk karena adanya isu kontroversi yang mengikat kepentingan publik, baik kepentingan materi, hingga emosional. Opini publik memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga menimbulkan konflik antara dua atau lebih pihak yang berseteru.

Dari pendapat demikian fenomena serupa juga muncul di area blok Cepu. Masyarakat tidak hanya berlaku sebagai pihak yang tidak berdaya (powerless). Saat berlangsungnya eksploitasi migas di Blok Cepu, mulai nampak proses disosiatif antara masyarakat dengan pihak MCL (Mobil Cepu Limited) yang merupakan anak perusahaan Exxon Mobile. Beberapa golongan masyarakat masih berupaya untuk memperjuangkan nasib sesamanya dengan membentuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak sebagai media diskusi, bidang pendidikan maupun kesehatan. Forkomasbaja (Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip), SPBU (Serikat Pemuda Banyu Urip), Bappeka (Banyuurip Peduli Pendidikan), ataupun CHC (Community Health Centre).

Forkomasbaja dan SPBU merupakan LSM yang dibentuk untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam beberapa kasus LSM tersebut yang memimpin unjukrasa atau pemblokiran jalan akses ke lokasi pertambangan karena kebocoran gas maupun karena penerangan jalan yang dianggap minimalis. Padahal truk-truk dari MCL yang seringkali lewat dan menghasilkan kegaduhan serta polusi udara.

Beberapa orang berpengaruh di sekitar area Banyu Urip juga memanfaatkan moment pengeboran. Ditandai dengan maraknya badan usaha kontraktor baru untuk ikut serta menggarap proyek baik jalan, suplai material, ataupun pekerja. Bukan hanya untuk kepentingan individu, namun dianggap bahwa badan usaha tersebut yang dapat mempekerjakan masyarakat lokal yang tidak memiliki skill khusus.

Kontraktor-kontraktor bentukan warga tersebut saling bersaing untuk mendapatkan tender. Baik persaingan dengan sesama kontraktor lokal maupun dengan kontraktor tingkat regional. Namun MCL memiliki standart tertentu untuk memilih kontraktor yang layak. Beberapa aspek yang diperhitungkan antara lain adalah modal, kompetensi, hingga profesionalitas. Pada titik kejenuhan ketatnya persyaratan yang ditetapkan. Beberapa elit lokal yang sekaligus pemilik badan usaha kontraktor tersebut menggerakkan masa untuk menghadang truk-truk pengangkut material, terkecuali truk-truk bernopol Bojonegoro. Pemblokiran jalan kerap dilakukan bukan hanya karena

permasalahan kontraktor saja, namun juga disebabkan karena rusaknya jalan, kurangnya penerangan, adanya kebocoran gas dll. Warga membangun palang-palang, portal, dan mengutip uang dari mereka, atau melempari mobil dan truk dengan bebatuan.

Opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu akan membawa efek tertentu pula (Bernard Berelson dalam Helena Oli, 2007)

Maraknya pemberitaan oleh media cetak maupun online sangat berpengaruh pada terbentuknya opini publik dalam skala luas, sehingga akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat.

Helena Oli (2007:2) menuturkan opini publik merupakan salah satu kekuatan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan kehidupan sehari-hari suatu bangsa. Opini publik juga merupakan penghubung antara kehidupan sosial dan kehidupan politik manusia, juga merupakan bidang antara kehidupan sebagai makhluk sosial dan warga negara suatu bangsa. Selain itu, opini publik banyak digunakan media massa maupun kaum politis dan pemerintah untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap program-programnya.

Berkaca dari pengeboran Blok Cepu yang mengalami banyak masalah sosial, tentunya perlu dijadikan pembelajaran untuk tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru. Salah satu tantangan dalam upaya eksplorasi gas eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru adalah bagaimana masyarakat yang bermukim di area ring satu eksplorasi dan eksploitasi gas dapat menerima kegiatan tersebut tanpa penolakan. Perlu adanya upaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat terutama warga ring satu Eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru. Bagaimana tindak lanjut suatu megaprojek tersebut dapat berlangsung selaras dengan kehidupan masyarakat.

Pendapat masyarakat perlu diukur serta diarahkan untuk upaya sinergi yang lebih baik. Terutama warga ring satu Eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru terkait fenomena sosial tentang pembebasan lahan yang berujung pada penurunan ekonomi warga, kecelakaan kerja, dampak lingkungan, hingga pada proses disosiatif sosial dalam tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru. Upaya pengukuran opini warga tersebut memerlukan metode penelitian yang valid, yaitu penelitian opini publik dengan metodologi penelitian survey. “Penelitian ini meliputi studi-studi *cross-sectional* dan *longitudinal* yang menggunakan kuesioner atau wawancara terencana dalam pengumpulan data, dengan tujuan untuk menggeneralisasi populasi berdasarkan sampel yang sudah ditentukan” (Babbie, 1990). Dengan metodologi tersebut diharapkan dapat membuahkan hasil yang diharapkan sesuai dengan realita sosial yang tengah terjadi di area ring satu Eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latarbelakang penelitian. Adanya tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru tersebut membutuhkan sinergi dengan masyarakat sekitar, terutama warga ring satu. Hal tersebut karena besarnya potensi masalah yang akan dialami, jika menilik pada fenomena masalah sosial ekonomi yang telah ditimbulkan dalam eksploitasi ladang minyak Banyu Urip Blok Cepu. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana opini publik masyarakat area ring satu terhadap tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru pada tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang penelitian. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan opini publik masyarakat area ring satu terhadap tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru pada tahun 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Segi Praktis

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat area ring satu tentang efek positif maupun efek negatif yang akan ditimbulkan dari tindak lanjut eksploitasi dan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru. Sehingga diharapkan masyarakat tidak terlalu berharap besar akan adanya peningkatan kesejahteraan dari eksploitasi gas tersebut. Namun lebih kepada sikap mawas diri dan lebih cerdas dalam beradaptasi dalam perubahan sosial yang kemungkinan besar akan terjadi.
- b. Bagi Pemerintah : Pemerintah dapat mengambil rujukan penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru untuk perusahaan terkait maupun program baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung.
- c. Bagi Perusahaan pertambangan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literasi untuk membuat berbagai terobosan program CSR maupun sarana komunikasi dengan masyarakat, dan upaya peningkatan etos kerja karyawan agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat membahayakan nyawa karyawan maupun masyarakat sekitar.

2. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan di bidang Sosiologi pada umumnya, dan bidang Ilmu komunikasi pada khususnya, terutama lebih spesifik pada bidang opini publik.